



REPRESENTASI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM NOVEL TERUSLAH BODOH JANGAN PINTAR KARYA TERE LIYE

**Heru Prasetyo¹⁾, Munaris²⁾, Ayu Setiyo Putri³⁾, Haysah Varina Salsabila⁴⁾,
Asyifa Zaharani⁵⁾**

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ Universitas Lampung

email: heru.prasetyo59@fkip.unila.ac.id¹⁾, munaris.1970@fkip.unila.ac.id²⁾,
ayu.setiyo@fkip.unila.ac.id³⁾, haysahvarinas@gmail.com⁴⁾, asyipzhrn@gmail.com⁵⁾

Abstract

The problem of this research is to explore the representation of corruption, collusion, and nepotism in the novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar by Tere Liye. The study was conducted using descriptive qualitative research method with the novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar by Tere Liye as the data source. Data analysis techniques used are pairing and agih techniques. Based on the analysis of the novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar by Tere Liye, the findings state that there are representations of corruption, collusion, and nepotism that are also similar in the lives of Indonesian people. Representation of corruption behavior, for example, is related to the abuse of authority to enrich oneself. The representation of collusion is an illegal act of cooperation to achieve certain goals without thinking about the adverse effects caused. Meanwhile, in the representation of nepotism, the author provides a story about the efforts of fraudulent behavior that uses positions for interests related to family relationships. A depiction that can certainly also be found in various lines of community life. Therefore, with the substance contained in it, the author suggests that the novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar can be brought into grade X Indonesian language learning classes in the independent curriculum. Because anti-corruption material is implicitly and explicitly conveyed by the author and is needed as an anti-corruption education effort in high school education.

Keywords: Corruption, Collusion, Nepotism, Sociology of Literature, Tere Liye.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah upaya mengeksplorasi representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terdapat di dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye sebagai sumber data. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik padan dan agih. Berdasarkan analisis dari novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye hasil temuan menyebutkan bahwa terdapat representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang juga serupa terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Representasi perilaku korupsi misalnya berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Representasi kolusi adalah tindakan kerjasama yang ilegal guna mencapai tujuan tertentu tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Sedangkan pada representasi nepotisme, pengarang memberikan kisah tentang upaya perilaku curang yang menggunakan jabatan untuk kepentingan yang berkenaan dengan hubungan keluarga. Sebuah penggambaran yang tentunya juga dapat ditemukan di beragam lini kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan substansi yang terkandung di dalamnya, penulis menyarankan agar novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* dapat dibawa masuk ke kelas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X pada kurikulum merdeka. Sebab materi anti korupsi secara tersirat dan tersurat disampaikan pengarang dan diperlukan sebagai upaya pendidikan anti korupsi di jenjang pendidikan SMA.

Kata Kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Sosiologi Sastra, Tere Liye.



I. PENDAHULUAN

Korupsi yang dikenal sebagai kejahatan luarbiasa merupakan sesuatu yang endemik, sistemik, dan *widespread* di Indonesia (Kurniawan, 2009). Hal ini dikarenakan korupsi merampas segala lini mulai dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masyarakat banyak (Kasmuri, 2017). Para pakar menyebut korupsi sebagai *extraordinary crime*, korupsi dikenal sebagai kejahatan yang teramat sukar sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus (Syahri, 2022). Bukan itu saja, korupsi juga dikatakan sebagai *invisible crime* dikarenakan amat sulit untuk memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah (Rukmini, 2009).

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, penyelesaiannya harus disertai dengan perubahan perilaku dan budaya manusia Indonesia secara komprehensif dan dalam waktu yang lama. Ini berarti, selain sistem, sarana, dan prasarana, lembaga-lembaga khusus seperti KPKPN, BPK, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi tersebut (Nubowo & Rosita Susi Aryanti, 2004).

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah berurat berakar di masyarakat dan

merajalela dalam berbagai aspek kehidupan, menghasilkan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan (Kurniadi, 2011). Rose-Ackerman menggunakan teori keadilan sosial untuk menyoroti bagaimana ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan memicu timbulnya korupsi (Anwar, 2018; Rukmini, 2009). Menurutnya, individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik yang besar cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali dengan cara yang tidak etis (Anwar, 2018; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Sementara kolusi adalah kerjasama ilegal atau tidak etis antara individu atau entitas untuk memperoleh keuntungan bersama (Kasmuri, 2017). Dalam artikel jurnal "Understanding Collusion: The Case of Corruption in Indonesia" oleh James Rothwell di tahun 2010, kolusi dipahami sebagai hasil dari distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara berbagai struktur sosial (Nyoman, 2015). Rothwell menggunakan pendekatan teori kekuasaan untuk menjelaskan bagaimana kolusi sering terjadi ketika kelompok atau individu memanfaatkan kekuasaan mereka dalam jaringan-jaringan informal untuk mencapai tujuan-tujuan



pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan umum (Anwar, 2018).

Sedangkan nepotisme dimaknai sebagai praktik memberikan posisi atau kesempatan kepada individu yang memiliki hubungan personal atau keluarga dengan mereka yang berwenang, bukan berdasarkan pada merit atau kualifikasi yang sesuai (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Dalam artikel jurnal *The Effects of Nepotism on Human Capital Accumulation* yang ditulis Andrea Ichino dan Giuseppe De Luca tahun 2007, nepotisme diartikan sebagai hasil dari struktur sosial yang diwarnai oleh elitisme dan kapitalisme (Dwi Anggraini et al., 2024). Praktik nepotisme berjalan dikarenakan ia mampu menjaga dan menguatkan posisi elit dalam struktur sosial, sementara di waktu yang bersamaan amat merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan menghambat akumulasi modal manusia yang adil (Syahri, 2022).

Melalui tinjauan teori-teori ini, kita dapat memahami korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai fenomena sosial yang kompleks dan saling terkait dengan distribusi kekuasaan, keadilan, dan struktur sosial dalam masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya menjadi masalah moral atau hukum, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan sistemik dalam masyarakat

yang perlu diatasi melalui reformasi institusi dan perubahan struktural (Anwar, 2012).

Berkaitan dengan hal-hal di atas, sastra yang baik adalah sastra yang mampu memberikan pencerahan bagi pembacanya (Puspita et al., 2018). Terlebih karya sastra merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan (*mimesis*) yang dapat memotret segala hal yang terjadi di kehidupan (Prasetyo et al., 2015). Sastra yang baikpun seharusnya bertugas memberi wawasan segar dan pencerahan kreatif kepada publik luas agar terhindar dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak korupsi (Prasetyo et al., 2023). Karya sastra yang bertema korupsi, masih sangat terbatas (Kasmuri, 2017). Dikatakan lebih lanjut bahwa selain miskinnya tema korupsi dalam sastra Indonesia, penelitian, pembahasan, bahkan pembicaraan mengenai tema korupsi dalam sastra jauh lebih sedikit lagi (Sarjono, 2012).

Novel merupakan prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun (Prasetyo et al., 2015). Novel merupakan sebuah produk sastra, pelaku-pelaku mulai dengan waktu muda, menjadi tua, bergerak dari sebuah adegan yang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain (Dian Mufitasari & Ariesma Setyarum, 2024).

Novel sebagai bagian dari prosa, menjadi *mimesis* kehidupan masyarakat



dikarenakan kerap mengisahkan kehidupan sehari-hari (Dian Mufitasari & Ariesma Setyarum, 2024). Dalam novel, terkadang sastrawan juga menyisipkan kritik sosial terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang ada (Halimatus & Diyah, 2023). Selain itu, novel juga piawai memengaruhi dan menciptakan persepsi juga tingkah laku dari masyarakat pembacanya (Nur et al., 2023). Namun perlu ditegaskan bahwa semua itu tetaplah cerminan kehidupan yang dikemas dalam fiksi (Aulia et al., 2024).

Sepanjang sejarah sastra, ada sejumlah karya fenomenal sastra yang membahas korupsi di sebagai bahan penulisan novel. Sebut saja seperti Orang-Orang Proyek Ahmad Tohari yang mengangkat bagaimana korupsi terjadi ketika proses pembangunan jembatan (Dwi Anggraini et al., 2024; Suaka et al., 2023).

Salah satu novel yang menyoroti korupsi secara mendalam adalah "*Laskar Pelangi*" karya Andrea Hirata. Dalam novel ini, Hirata menggambarkan korupsi di sektor pendidikan, di mana dana sekolah digunakan secara tidak efektif dan pemimpin sekolah melibatkan diri dalam praktik korupsi. Melalui cerita tentang anak-anak di daerah terpencil yang berusaha meraih pendidikan, Hirata mengungkapkan betapa korupsi tersebut merugikan masa depan generasi muda.

Seno Gumira Ajidarma dalam novel "*Darah Muda*" juga menyoroti kolusi, terutama dalam konteks politik dan bisnis. Ajidarma menggambarkan hubungan yang erat antara politikus dan pengusaha, yang sering kali menghasilkan keputusan yang merugikan masyarakat umum demi keuntungan pribadi. Kolusi ini tidak hanya menghasilkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan di Indonesia sering kali memperkuat praktik-praktik korupsi.

Nepotisme juga sering kali menjadi fokus dalam novel-novel Indonesia. Ahmad Fuadi dalam "*Negeri 5 Menara*" mengeksplorasi tema ini dalam konteks pendidikan dan karier. Melalui karakter utamanya, Alif, Fuadi menggambarkan bagaimana kedudukan dan kesempatan sering kali diberikan kepada orang-orang terdekat, bukan kepada individu yang paling berkompeten. Hal ini mengilustrasikan tantangan bagi individu yang berjuang untuk meraih kesuksesan di tengah sistem yang didominasi oleh nepotisme.

Novel 86 karya Oki Madasari juga memotret mimesis kehidupan yang acap melakukan "86" untuk memuluskan semua kegiatan (Dian Mufitasari & Ariesma Setyarum, 2024). Ada pula karya Tere Liye dengan judul *Tanah Para Bandit*, *Negeri Para Bedebah*, dan *Negeri di Ujung Tanduk*



atau karya JS. Khairen dalam *Bungkam Suara* yang secara gamblang memberikan warna korupsi, kolusi, dan nepotisme yang secara halus menyindir kekinian di negeri Indonesia (Halimatus & Diyah, 2023; Nur et al., 2023; Puspita et al., 2018).

Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye merupakan salah satu teks sastra di Indonesia yang memiliki khazanah informasi yang menarik tentang tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Buku setebal 371 halaman terbitan Sabak Grup Nusantara tersebut secara lugas memotret hal ihwal praktik yang umum ditemukan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pisau bedah sosiologi sastra. Sebuah pendekatan yang memadukan studi sastra dengan konsep-konsep sosial dan budaya untuk menjelajahi dan menganalisis karya sastra sebagai cermin dari realitas sosial (Prasetyo et al., 2015). Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana karya sastra merefleksikan, merefraksikan, memengaruhi, dan merekam dinamika sosial, norma-norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Prasetyo et al., 2023).

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan objektif sastra. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu Metode ini juga dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara detail dan gamblang fakta yang ditemukan untuk selanjutnya diberikan kajian analisis (Santoso & Prasetyo, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dalam bidang sastra bukanlah penelitian biasa dikarenakan membutuhkan pemahaman komprehensif tentang suatu pemaknaan yang dalam. Sementara pendekatan objektif adalah penelitian sastra yang berfokus kepada teks sastra sebagai objek kajian tanpa mempedulikan bagian lain yang berada di luar teks sastra.

Peneliti melakukan teknik pustaka dengan menggunakan novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Kemudian peneliti melakukan teknik baca dengan membaca secara cermat novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Dalam hal ini, untuk mendapatkan data dalam novel, peneliti menghubungkan representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sosiologi sastra. Selanjutnya, yaitu teknik catat dengan mencatat setiap data yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Analisis representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme menggunakan sosiologi sastra



di dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye mendapatkan sejumlah temuan data. Tercatat terdapat enam data yang menggambarkan perilaku korupsi, sembilan belas data yang berkenaan dengan data kolusi, dan tiga belas data yang merepresentasikan perilaku nepotisme di dalam novel.

B. Pembahasan

Representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye dianalisis menggunakan pisau bedah sosiologi sastra yang dibatasi dengan pemahaman dari komisi pemberantasan korupsi atas pemaknaan perilaku tersebut.

1. Perilaku Korupsi

Perilaku korupsi kerap ditunjukkan oleh penyelenggara negara erat kaitannya dengan upaya menjaga keadaan *status quo* yang menguntungkan oknum penyelenggara negara. Hal itu seperti yang tergambar dalam kutipan di bawah.

”Tapi menurut survei terakhir, mayoritas rakyat meminta proyek itu dibatalkan. Pak. Sentimen tambang-tambang negatif. Berpuluh tahun berlalu, meskipun pemerintah mengklaim tambang memberikan manfaat, pemasukan bagi negara, mayoritas penduduk di dekat tambang tetap miskin, terbelakang. Proyek itu hanya menguntungkan pihak korporasi dan investor asing. Pihak perusahaan mendapatkan banyak keringanan pajak, *tax holiday*. Belum lagi

banyaknya pekerja asing”
(TBJP/Kor/1/hlm64).

Kutipan ini dihadirkan pengarang seolah hendak menyadarkan pembaca bahwa cukup banyak kasus serupa di Indonesia yang pada akhirnya tidak mendapatkan perhatian dari aparat. Seperti yang terjadi Magelang, Jawa Tengah berkenaan dengan aksi tambang ilegal yang merusak lingkungan wilayah konservasi Merapi. Kendati bencana kerap terjadi karena rusaknya lingkungan aparat pemerintah seolah abai dan tak berupaya melakukan tindakan tegas (Fauziyah & Putri, 2023). Bahkan parahnya, pekerja tambang justru menggunakan tenaga kerja asing ilegal bukan memberdayakan warga lokal sekitar tambang (Gustiana & Gonsaga, 2023). Maka kutipan *Berpuluh tahun berlalu, meskipun pemerintah mengklaim tambang memberikan manfaat, pemasukan bagi negara, mayoritas penduduk di dekat tambang tetap miskin, terbelakang* pada novel, hal ini menjadi representasi korupsi yang nyata dan hendak ditegaskan oleh pengarang melalui novel.

Perilaku koruptif juga muncul dalam kutipan lainnya yang menggambarkan aparat pemerintah seolah memberikan karpet merah kepada investor asing menggunakan tanah warga tanpa kompromi kepada masyarakat. Kutipan tersebut sebagai berikut.



“Ini pulau kami pak!” Siti berseru ketus, ”Ratusan tahun negara ke mana saja? Jika negara merasa memiliki tanah ini kalian ke mana saja? Datang tidak pernah, mendadak memberikan tanah itu ke orang lain! Atau kalian telah disuap oleh perusahaan itu?”
(TBJP/Kor/1/hlm104).

Bagi pembaca sastra yang juga mengikuti perkembangan pemberitaan nasional, apa yang dituliskan penulis dalam novel seakan begitu nyata dengan kejadian yang terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Rempang. Masyarakat yang telah tinggal bertahun-tahun harus digusur karena hadirnya investasi. Atas kesewenangan itu, maka tak ayal kadang masyarakat berpikir bahwa aparat pemerintah sama sekali tidak mendukung warga karena telah mendapatkan upeti dari investor untuk memuluskan jalan investasi (Laksono, 2023). Pandangan tokoh yang mempertanyakan keberadaan aparat negara yang tak pernah hadir dan peduli selama ratusan tahun dan justru cekatan saat hendak menggusur warga menjadi tanda tanya besar bahwa ada sesuatu yang didapatkan oknum aparat. Kutipan ini menjadi representasi perilaku koruptif yang juga bisa ditemukan di masyarakat.

2. Perilaku Kolusi

Kolusi adalah kerjasama ilegal atau tidak etis antara individu atau entitas untuk memperoleh keuntungan bersama. Perilaku tidak terpuji ini juga ditemukan di dalam

novel, seperti yang tergambar pada data di bawah.

"Daripada sibuk komplain mengurus satu dua wawancara, suruh mereka menyumbang lagi, sepuluh kali lebih banyak, agar aku bisa memenangkan pemilihan ini. Kita butuh lebih banyak amplop, sembako, pengumpulan massa. Beri tahu mereka, jika aku kalah, lupakan konsesi itu! Mereka tidak akan mendapat apa pun dari sana". (TBJP/Kol/2/hlm66)

Kutipan tersebut merupakan pernyataan seorang calon presiden yang naik pitam dikarenakan banyaknya desakan wawancara dari wartawan yang mempertanyakan isu konsesi tambang di tengah kontestasi pemilihan presiden. Calon tersebut murka, sebab isu itu amat sensitif dan mengganggu elektabilitas dirinya. Sementara menghadapi kampanye ia membutuhkan dana segar tak terbatas untuk menggerakkan massa agar memilih dirinya kembali.

Sekilas tak ada yang salah dari kutipan itu. Hanya saja pada konteks yang dibungkus dalam *fragmen* tersebut, pernyataan calon presiden akan dana segar untuk kampanye bersumber bukan dari dana legal. Justru dana tersebut hadir dari kalangan investor nakal yang tidak ingin usahanya terganggu jika presiden baru terpilih. Calon presiden pun menginginkan dana segar investor nakal agar kontestasi dimenangkan, sehingga ia tak perlu risau tentang jeruji penjara karena



permasalahan hukum yang ia perbuat. Tentu saja, investor juga merasa nyaman karena presiden incumbent dapat memperpanjang kontestasi pemilihan presiden.

Hal serupa sejatinya juga menjadi perhatian di Indonesia, ketika KPU didorong masyarakat membuka aliran dana kampanye para pasangan calon presiden (Prabowo, 2023). Sayangnya, keinginan itu tidak dapat terpenuhi karena aturan yang ada justru menutup kran keterbukaan informasi publik akan dana kampanye (BBC News, 2023). Sehingga masyarakat pun akan terus bertanya, siapa pemilik modal yang mengelontorkan triliunan dana untuk kampanye calon presiden hingga ia menang. Kondisi serupa yang coba direpresentasikan dalam novel karya Tere Liye tersebut.

3. Perilaku Nepotisme

Nepotisme jika merujuk kepada makna, merupakan praktik memberikan posisi atau kesempatan kepada personal yang memiliki keterkaitan secara pribadi atau keluarga dengan mereka yang berwenang, bukan berdasarkan pada merit atau kualifikasi yang sesuai. Representasi seperti ini juga dihadirkan dalam novel, yang membuat membaca apakah ini fiksi atau nonfiksi, seperti data yang disajikan berikut.

"Bahkan sekalipun kau menang di babak final. Karena siapa yang akan mewakili provinsi ini sudah ditentukan sebelum

pertandingan. Termasuk undian setiap babak, sudah ditentukan sejak awal, agar orang itu bisa lolos ke final."

Anak itu terdiam. Apa maksudnya?

"Lawan yang kau kalahkan di final adalah anak dari pejabat provinsi. jadi apapun caranya, atlet lain harus disingkirkan dia juga memegang rekomendasi dari pengurus pusat". (TBJP/Nep/3/hlm144)

Kisah di novel ini rasanya ditulis pengarang terinspirasi dari apa yang terjadi di Indonesia. Sebab apa yang digambarkan, merepresentasikan perilaku nepotisme di negeri ini. Bahwa pemilik kuasa akan senantiasa tergoda untuk menggunakan kuasa tersebut untuk kepentingan pribadi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Kisah seorang atlet bulutangkis di pulau antah berantah yang harus mengubur mimpinya karena kalah sejak awal dari anak pejabat, nyaris serupa dengan banyak kasus di Indonesia. Sebut saja bagaimana seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang tiap tahun selalu terdengar kisah nepotisme anak pejabat yang dititipkan (Louis, 2024) atau seleksi taruna akpol yang juga tidak kalah gaduh karena perilaku nepotisme di kalangan pejabat kepolisian (Herin, 2024). Maka kisah nepotisme atlet bulutangkis di novel ini menjadi representasi yang nyata perilaku serupa di Indonesia yang juga terjadi di banyak lini.



IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye hasil temuan menyebutkan bahwa terdapat representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang juga serupa terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Representasi perilaku korupsi misalnya berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Representasi kolusi adalah tindakan kerjasama yang ilegal guna mencapai tujuan tertentu tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Sedangkan pada representasi nepotisme, pengarang memberikan kisah tentang upaya perilaku curang yang menggunakan jabatan untuk kepentingan yang berkenaan dengan hubungan keluarga. Sebuah penggambaran yang tentunya juga dapat ditemukan di beragam lini kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan substansi yang terkandung di dalamnya, penulis menyarankan agar novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* dapat dibawa masuk ke kelas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X pada kurikulum merdeka. Sebab materi anti korupsi secara tersirat dan tersurat disampaikan pengarang dan diperlukan sebagai upaya pendidikan anti korupsi di jenjang pendidikan SMA.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, M. S. (2012). Perkembangan Korupsi dalam Novel Indonesia. *Atavisme*, 2(15), 133–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.55.133-146>.
- Anwar, M. S. (2018). *Sastra dan Korupsi: Kajian Interdisipliner*. Bisakimia.
- Aulia, S. A., Yunita Suryani, & Salimulloh Tegar Sanubarianto. (2024). Bahasa Gender dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 71–0. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v6i1.12274>.
- BBC News. (2023, December 19). *Transaksi “Mencurigakan” Ratusan Miliar Rupiah Terkait Dana Kampanye - “Aturan pemilu dirancang agar tidak ada akuntabilitas.”* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/Cv2qr91wx2ro>.
- Dian Mufitasari, & Ariesma Setyarum. (2024). Permasalahan Sosial Politik Pada Novel 86 Karya Okky Madasari Dalam Analisis Sosial Gillin dan Gillin. *Pragmatik : Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 2(3), 198–209. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i3.727>.
- Dwi Anggraini, N., Fairus Nasywa, S., & Kurniawan, E. D. (2024). Problematika Korupsi Kolusi Nepotisme Proyek Pembangunan Jembatan Dalam Novel Orang - Orang Proyek Karya Ahmad Tohari. *Gudang Jurnal Multidisiplin*, 2(1), 245–248. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.235>.



- Fauziyah, T. A., & Putri, G. S. (2023, November 11). *Mata Air Hilang, 2.000 Warga Lereng Merapi Demo agar Penambangan Pasir Ilegal Dihentikan* . <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/02/11/172253778/Mata-Air-Hilang-2000-Warga-Lereng-Merapi-Demo-Agar-Penambangan-Pasir-Ilegal>.
- Gustiana, S., & Gonsaga, A. (2023, November 16). *Ratusan Mahasiswa di Sumbawa Gelar Aksi Tutup Tambang Ilegal, Minta WNA Penambang Tanpa Izin Dideportasi* . <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/11/16/053025178/Ratusan-Mahasiswa-Di-Sumbawa-Gelar-Aksi-Tutup-Tambang-Ilegal-Minta-Wna?Page=all>.
- Halimatus, N., & Diyah, S. ' . (2023). Patologi Ekonomi Politik Masyarakat Modern dalam Trilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye. *Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2894>.
- Herin, F. P. (2024, July 9). *Kegaduhan Seleksi Taruna Akpol di NTT, Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolri*. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Nusantara/2024/07/09/Kegaduhan-Seleksi-Taruna-Akpol-Di-Ntt-Kompolnas-Minta-Klarifikasi-Kapolri>.
- Kasmuri. (2017). Representasi Korupsi dalam Novel-Novel Indonesia Era Reformasi. *Humanis*, 2(9), 169–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/humanis.v9i2.367>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. In Jakarta: KPK. KPK.
- Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi: Dampak Masif Korupsi*. Dedikbud RI, Dirjend. PT, Bagian Hukum Kepegawaian.
- Laksono, M. Y. (2023, September 14). *Seputar Konflik Proyek di Rempang, Duduk Persoalan, dan Status Kepemilikan Tanah Warga* . <https://Www.Kompas.Com/Properti/Read/2023/09/14/130000621/Seputar-Konflik-Proyek-Di-Rempang-Duduk-Persoalan-Dan-Status?Page=all>.
- Louis, J. (2024, June 11). *Dugaan Kecurangan Seleksi Paskibraka Nasional, Wattimena Kecewa Anaknya Jadi Tumbal Nepotisme* . <https://Ambon.Tribunnews.Com/2024/06/11/Dugaan-Kecurangan-Seleksi-Paskibraka-Nasional-Wattimena-Kecewa-Anaknya-Jadi-Tumbal-Nepotisme>.
- Nubowo, A., & Rosita Susi Aryanti. (2004). *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Prespektif Pendidikan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY.
- Nur, M. I., Rifki, F., & Ahmadi, A. (2023). Korupsi dalam Novel Bungkam Suara Karya JS Khairen dan Tanah Para Bandit Karya Tere Liye: Kajian Krimonologi. *Bapala*, 10(4), 280. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/55840>.
- Nyoman, S. (2015). Potret Koruptor dalam Novel Korupsi. *Pujangga*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pujangga.v1i1.149>.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. YayasanObor Indonesia.
- Prabowo, K. W. (2023, July 3). *Aturan Sosialisasi Pemilu Dinilai Penting untuk Akuntabilitas Dana Kampanye*.



<https://www.Metrotvnews.Com/Read/KvJCB6dL-Aturan-Sosialisasi-Pemilu-Dinilai-Penting-Untuk-Akuntabilitas-Dana-Kampanye>.

- Pradopo, R. D. (2021). *Teori kritik dan penerapannya dalam sastra Indonesia modern*. UGM PRESS.
- Prasetyo, H., Diah Pertiwi, A., & Riadi, B. (2023). Nilai Sosial dalam Kumpulan Cerpen Trilogi Alina Karya Seno Gumira Ajidarma dan Rancangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Edukasi Lingua Sastra*, 21(1), 76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47637/elsa.v21i1.710>.
- Prasetyo, H., Munaris, & Siti, S. (2015). Representasi PDRI dalam Novel Presiden Prawiranegara dan Pembelajaran Sastra di Perguruan Tinggi. *J-Simbol*, 3, 1–10.
<https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO/article/view/10468>.
- Puspita, A. C., Suwandi, S., & Hastuti, S. (2018). Kritik Sosial dan Nilai Moral dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk Karya Tere Liye. *Indonesian Language Education and Literature*, 4(1), 11.
<https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.1956>.
- Putri, D. L., & Nugroho, R. S. (2024, June 9). *Deretan Jenderal Polisi yang Duduki Jabatan Sipil 2024, Terbaru Irjen Risyapudin Nursin*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/09/170000865/deretan-jenderal-polisi-yang-duduki-jabatan-sipil-2024-terbaru-irjen?Page=all>.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni.
- Salama, N. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Santoso, S. A., & Prasetyo, H. (2024). Religiositas dalam Antologi Puisi Epigram 60 Karya Joko Pinurbo dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(2), 141–153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23960/J-Simbol>.
- Sari, H. P., & Meiliana, D. (2024, September 26). *KPK Tetapkan 3 Orang Tersangka dalam Kasus Suap Izin Usaha Tambang di Kaltim*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/26/22172531/kpk-tetapkan-3-orang-tersangka-dalam-kasus-suap-izin-usaha-tambang-di-kaltim>.
- Sarjono, A. R. (2012). *Perkara Korupsi dalam Sastra Indonesia*. The Intercultural Institute.
- Suaka, N., Tia, K., & Adinda, W. (2023). Membongkar Kasus Korupsi Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari: Kajian Dekonstruksi. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, dan Sastra*, 3(1), 130–138.
<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/pedalitra/article/view/3353>.
- Sugandi, A. T. (2022, September 6). *Melesat Jabatan Karena Status Ajudan*.
<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20220906/melesat-jabatan-karena-status-ajudan/>.



Sukmana, Y., & Jatmiko, B. P. (2018, November 16). *Investasi Bisa Tak Perlu Bayar PPh, Ini Skema Tax Holiday yang Baru*.
<https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2018/11/16/173216126/Investasi-Bisa-Tak-Perlu-Bayar-Pph-Ini-Skema-Tax-Holiday-Yang-Baru>.

Syahri, B. S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi. *Al-Mizan: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 8(2), 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88>.

Tere Liye. (2024). *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* (4th ed.). Sabak Grip Nusantara.

Ul Qalbi, S., & Mulyati, Y. (2024). Representasi Konflik Aceh dalam Cerpen Kontemporer Pascaperjanjian Damai. *GHÂNCARAN: JURNAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA*, 5(2), 323–337.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ghancaran.v5i2.8629>.